Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/ijmst
Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 836-843
P-ISSN: 2986-6790, e-ISSN: 2986-6782

Penguatan Ekosistem Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Surabaya

Maia Sabti Syaro, Revalina Azmi Zazkiah, Felia Noorlibna Badzlin, Alisya Regitta Cahyani, Indah Prabawati, Wilda Sumarsyah
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
maiasabti22@gmail.com, revalinazazkiah@gmail.com, felia.nb06@gmail.com, tataalisya99@gmail.com

Abstrak

Anak Tidak Sekolah (ATS) masih menjadi persoalan besar dalam pemenuhan hak pendidikan, dengan 3.966.858 anak tercatat per 1 April 2026. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 hadir sebagai instrumen hukum pertama yang mengatur pencegahan dan penanganan ATS secara lintas sektor, dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana utama. Artikel ini menganalisis penguatan ekosistem pendidikan dalam pencegahan dan penanganan ATS di Kota Surabaya menggunakan teori ekologi Bronfenbrenner dan konsep kolaborasi Pentahelix. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, dengan data sekunder berupa peraturan, dokumen kebijakan, data statistik, jurnal, dan pemberitaan, yang dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surabaya telah cukup kuat pada lapisan makrosistem melalui penyediaan 42ribu kursi SMP dan penghapusan pungutan, serta pada lapisan mikrosistem melalui Bopda yang disalurkan lewat sekolah kepada 7.380 siswa. Namun, hubungan antar lembaga pada mesosistem masih lemah karena belum ada data terpadu ATS dan Anak Berisiko Putus Sekolah (ABPS), sehingga program Bopda, SKB, Sekolah Rakyat, dan campus Soicial Responsibility berjalan sendiri-sendiri. Dalam kerangka Pentahelix, unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat sudah bergerak, sedangkan dunia usaha dan media belum dilibatkan secara sistematis. Penguatan ekosistem pendidikan di Surabaya perlu bertumpu pada penyusunan data ATS dan ABPS yang terpadu, pembentukan forum koordinasi lintas pihak yang bersifat tetap, dan penetapan peran yang jelas bagi dunia usaha dan media.

Kata kunci: Anak Tidak Sekolah, Ekosistem Pendidikan, Pentahelix, Teori Ekologi Bronfenbrenner, Kota Surabaya

Abstract

Out-of-School Children (OOSC) remain a major challenge in fulfilling the right to education, with 3,966,858 children recorded as of April 1, 2026. Presidential Regulation Number 3 of 2026 serves as the first legal instrument regulating cross-sectoral prevention and management of OOSC, with local governments acting as the primary implementers. This study analyzes the strengthening of the educational ecosystem in preventing and addressing OOSC in Surabaya City using Bronfenbrenner's ecological theory and the Pentahelix collaboration framework. This research employs a descriptive qualitative method through a literature review approach. Secondary data were collected from regulations, policy documents, statistical reports, academic journals, and news publications, and analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that Surabaya has established relatively strong macrosystem support by providing 42,000 junior high school seats and eliminating educational fees, alongside microsystem support through Bopda assistance distributed to 7,380 students. However, interinstitutional coordination within the mesosystem remains weak due to the absence of integrated data on OOSC and Children at Risk of Dropping Out (CRDO). Consequently, Bopda, Community Learning Centers, People's Schools, and Campus Social Responsibility programs operate independently. Within the Pentahelix framework, government, academia, and communities have demonstrated active participation, while businesses and media remain insufficiently engaged. Strengthening Surabaya's educational ecosystem requires integrated OOSC and CRDO databases, permanent cross-sectoral coordination forums, and clearly defined roles for businesses and media.

Keywords: Out-Of-School Children, Educational Ecosystem, Pentahelix, Bronfenbrenner's Ecological Theory, Surabaya City

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang dijamin konsitusi. Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan untuk mengembangkan dirinya. Pemenuhan hak ini tidak berhenti pada tersedianya sekolah, tetapi menuntut kepastian bahwa setiap anak benar-

benar masuk dan bertahan dalam layanan pendidikan. Dalam praktiknya, kepastian itu belum sepenuhnya terwujud, dan salah satu wujud persoalannya adalah keberadaan Anak Tidak Sekolah (ATS).

Skala persoalan ini masih besar. Data Kemendikdasmen per 1 April 2026 mencatat 3.966.858 ATS, terdiri atas 1.913.633 anak belum pernah bersekolah, 986.755 anak putus sekolah, san 1.066.470 anak lulus tetapi tidak melanjutkan (Kemendikdasmen, 2026). Sementara itu, Susenas BPS menunjukkan sekitar 3,78 juta anak usia 6-18 tahun berada diluar sekolah, dengan kelompok usia 16-18 tahun sebagai yang terbesar, yakni 2,48 juta anak (BPS, 2026). Persoalan ini juga bersifat multidimensi. Data JPPI menyebutkan sekitar 76 persen anak tidak bersekolah karena faktor ekonomi (JPPI, 2026), sehingga penanganannya tidak bisa bertumpu pada satu institusi saja.

Sebagai respons, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Perpres ini ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 26 Januari 2026, kemudian diluncurkan secara resmi pada 3 Juni 2026. Perpres ini diterbitkan untuk mempercepat kebijakan wajib belajar 13 tahun dan memastikan terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan. Dari sisi tata kelola, Perpres ini menjadi instrumen hukum pertama yang secara khusus mengatur pencegahan dan penanganan ATS melalui pendekatan lintas sektor, memperkuat posisi pemerintah daerah sebagai aktor utama implementasi, dan membuka ruang kolaborasi multipihak (Hukumonline, 2026). Pembedaan antara ATS dan Anak Berisiko Putus Sekolah (ABPS) menunjukkan bahwa kebijakan ini menggabungkan pendekatan preventif dan kuratif (Perpres No. 3 Tahun 2026).

Dalam konteks inilah gagasan penguatan ekosistem pendidikan menjadi relevan. Teori ekologi Bronfenbrenner (1979) memandang perkembangan anak sebagai hasil interaksi berlapis antara mikrosistem, mesosistem, eksosistem, dan makrosistem. Dengan kerangka itu, putus sekolah dipahami sebagai akibat dari lemahnya dukungan pada beberapa lapisan sekaligus, bukan semata kegagalan individu anak. Kolaborasi lintas aktor dalam model Pentahelix, yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media (Halibas et al., 2017), menjadi cara mewujudkan dukungan tersebut.

Penguatan ekosistem pendidikan perlu menghubungkan identifikasi masalah, penyediaan layanan, pendampingan anak, dan pemantauan keberlanjutan pendidikan. Dalam konteks ATS, pendataan bukan sekadar kegiatan administratif untuk menghitung jumlah anak di luar sekolah. Data perlu menjelaskan lokasi anak, usia, riwayat pendidikan, alasan tidak bersekolah, kondisi keluarga, serta kebutuhan layanan. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk menentukan intervensi. Tanpa data yang diperbarui dan dapat dipertukarkan antarlembaga, anak berisiko tidak terjangkau atau tercatat berulang, sementara perubahan status pendidikan sulit dipantau.

Pada tahap pencegahan, perhatian perlu diarahkan kepada anak yang masih bersekolah tetapi menunjukkan tanda kerentanan, seperti ketidakhadiran berkepanjangan, kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah, atau perubahan kondisi keluarga. Sekolah dapat mengenali perubahan lebih awal karena berinteraksi langsung dengan anak. Namun, sekolah tidak selalu memiliki kewenangan maupun sumber daya untuk menyelesaikan seluruh penyebab kerentanan. Jika hambatan berkaitan dengan biaya hidup, pekerjaan orang tua, dokumen kependudukan, disabilitas, atau persoalan sosial, diperlukan rujukan kepada perangkat daerah dan lembaga terkait. Pencegahan putus sekolah membutuhkan mekanisme tindak lanjut, bukan sekadar imbauan agar anak tetap bersekolah.

Penanganan ATS juga memerlukan pendekatan sesuai kondisi masing-masing anak. Anak yang belum pernah bersekolah, anak yang berhenti sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan, dan anak yang telah lulus tetapi tidak melanjutkan memiliki kebutuhan berbeda. Sebagian mungkin memerlukan bantuan biaya dan perlengkapan sekolah, sedangkan lainnya membutuhkan pendampingan keluarga, penyesuaian layanan belajar, akses pendidikan kesetaraan, atau penyelesaian kendala administrasi. Keberhasilan penanganan tidak cukup diukur dari jumlah anak yang didaftarkan kembali. Pemerintah perlu memastikan anak dapat mengikuti pembelajaran, memperoleh dukungan, dan bertahan hingga menyelesaikan pendidikan pada jenjang yang sesuai.

Penerapan model Pentahelix dapat memperkuat layanan apabila setiap aktor memiliki peran jelas dan saling melengkapi. Pemerintah menetapkan kebijakan, mengoordinasikan pendataan, menyediakan anggaran, serta memastikan layanan menjangkau sasaran. Akademisi mendukung pemetaan persoalan dan evaluasi program. Dunia usaha dapat berkontribusi melalui pembiayaan, fasilitas, maupun tanggung jawab sosial untuk pendidikan. Masyarakat, termasuk organisasi sosial dan keluarga, membantu menemukan anak yang belum terjangkau serta

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14659
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

memberikan pendampingan. Media menyebarluaskan informasi, membangun kepedulian publik, dan mengawasi kebijakan. Kolaborasi perlu dibangun melalui komunikasi dan pembagian tanggung jawab agar tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

Dalam pelaksanaannya, penguatan ekosistem pendidikan menghadapi tantangan berupa perbedaan basis data, keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi yang belum berkelanjutan, serta mekanisme rujukan yang belum jelas. Bantuan juga tidak otomatis menjamin akses apabila informasi tidak menjangkau keluarga sasaran atau prosedur penerimaannya sulit dipenuhi. Evaluasi kebijakan perlu melihat keterhubungan regulasi, kapasitas pelaksana, ketersediaan layanan, partisipasi masyarakat, dan hasil yang diterima anak. Aspek tersebut penting untuk menilai apakah kebijakan menjawab penyebab anak berada di luar sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian di Surabaya perlu memperhatikan hubungan antarkomponen ekosistem, bukan hanya menginventarisasi program. Analisis dapat mencakup koordinasi pemerintah daerah dengan sekolah dan aktor nonpemerintah, pendataan ATS, intervensi, dan pemantauan setelah anak kembali mengakses pendidikan. Kajian juga perlu menelaah faktor pendukung dan penghambat kolaborasi setelah berlakunya Perpres Nomor 3 Tahun 2026. Fokus ini diharapkan menggambarkan kesenjangan antara kerangka kebijakan dan pelaksanaannya di daerah. Dengan demikian, artikel ini menilai bagaimana kerja sama lintas sektor dapat berkelanjutan untuk mencegah anak keluar dari pendidikan dan mengembalikan ATS ke layanan pendidikan yang sesuai.

Kota Surabaya menarik dikaji karena sudah memiliki berbagai instrumen. Pemkot menyatakan daya tampung sekolah negeri dan swasta pada SPMB 2026/2027 mencukupi untuk seluruh lulusan SD (Beritajatim, 2026). Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2026 mengatur pengelolaan Bopda bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu, dan pada tahun ajaran 2026/2027 bantuan diberikan kepada 7.380 siswa (ANTARA Jatim, 2026). Meski begitu, program-program tersebut masih cenderung berjalan parsial. Kajian yang menelaah penguatan ekosistem pendidikan secara terpadu lintas aktor pasca-terbitnya Perpres No. 3 Tahun 2026 di Surabaya masih terbatas. Karena itu, artikel ini menganalisis bagaimana penguatan ekosistem pendidikan dalam pencegahan dan penanganan ATS di Kota Surabaya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih untuk menganalisis penguatan ekosistem pendidikan dalam pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Surabaya. Penelitian berfokus pada kebijakan, program pemerintah, serta keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan ATS.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber tertulis. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah, laporan dan data statistik dari instansi terkait, jurnal ilmiah, buku, serta artikel dari media yang relevan. Beberapa dokumen yang menjadi bahan kajian antara lain Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah, data Kemendikdasmen, data Badan Pusat Statistik (BPS), serta informasi mengenai program pendidikan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah dokumen serta berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan dari berbagai sumber dengan teori ekologi Bronfenbrenner dan konsep kolaborasi Pentahelix untuk melihat bagaimana peran pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media dalam membangun ekosistem pendidikan yang mendukung pencegahan dan penanganan ATS di Kota Surabaya.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Sebelum terbitnya peraturan Presiden no.3 tahun 2026, penanganan ATS dilaksanakan secara sektoral. Setiap kementerian menjalankan programnya masing-masing, pemerintah daerah menempuh caranya sendiri, dan koordinasi antarpihak kerap tidak berkelanjutan. Perpres tersebut hadir sebagai instrumen hukum pertama yang

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14659
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

secara khusus mengatur pencegahan serta penanganan ATS lintas sektor. Peraturan ini mendorong keterhubungan data, menempatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana utama, serta membuka ruang keterlibatan bagi dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat.

Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan arah yang sejalan dengan semangat Perpres tersebut. Pemkot menyiapkan 42 ribu kursi SMP negeri maupun swasta pada SPMB 2026/2027, jumlah yang mencukupi untuk menampung seluruh lulusan SD. Wali Kota juga melarang sekolah negeri menjual seragam dan menegaskan bahwa sejak November 2026 tidak diperbolehkan adanya pungutan dalam bentuk apa pun. Kebijakan ini relevan karena JPPI mencatat faktor ekonomi sebagai alasan bagi sekitar 76 persen anak yang tidak bersekolah. Walaupun demikian, ketersediaan kursi belum menjamin hilangnya ATS. Anak yang tidak pernah bersekolah atau telah lama berhenti tidak melalui jalur pendaftaran reguler, sehingga diperlukan penjangkauan aktif terhadap mereka.

Bagi keluarga berpenghasilan rendah, biaya masih menjadi hambatan utama. Pada tahun ajaran 2026/2027, Pemkot menyalurkan bantuan kepada 7.380 siswa SMA, SMK, dan MA dari keluarga desil 1 sampai 5. Bantuan tersebut mencakup seragam, sepatu, serta biaya pendidikan sebesar Rp.350ribu per bulan bagi siswa sekolah swasta. Terdapat perubahan mekanisme yang patut dicatat. Dana kini disalurkan melalui sekolah, tidak lagi langsung kepada siswa, karena evaluasi sebelumnya menemukan bantuan yang tidak digunakan untuk kebutuhan pendidikan. Temuan ini menunjukkan bahwa pencegahan anak berisiko putus sekolah (ABPS) tidak cukup dengan pemberian dana, melainkan juga memerlukan jaminan bahwa dana sampai pada peruntukannya. Dari sisi pengasuhan, Dispendik mengajak para ayah untuk lebih terlibat, misalnya dengan mengantar anak pada hari pertama sekolah dan mengambil rapor. Program ini tidak menyasar ATS secara langsung, tetapi sejalan dengan pandangan bahwa kepedulian keluarga dapat memengaruhi keberlangsungan anak di sekolah.

Dispendik melibatkan pengurus RT/RW, pekerja sosial masyarakat, dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan untuk menemukan anak putus sekolah, lalu mengarahkannya ke sekolah reguler, PKBM, atau balai pelatihan kerja. Persoalan data masih menjadi kelemahan utama. Kemendikdasmen mengakui bahwa validitas data merupakan tantangan terbesar di daerah. Dispendik pernah menyatakan tidak ada anak putus sekolah jenjang SD dan SMP pada 2016 sampai 2020, sementara pemberitaan yang dikutip penelitian lain menyebut lebih dari 12.000 anak di Surabaya tidak melanjutkan pendidikan. Dari unsur pemerintah, anak putus sekolah dapat melanjutkan pendidikan melalui Paket C vokasional di SKB Negeri 1 atau masuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 2. Namun, sekolah rakyat hanya menerima 270 siswa pada tahun ini, sehingga jangkauannya masih jauh dari kebutuhan. Unsur akademisi mengisi sebagian kekurangan tersebut melalui program Campus Social Responsibility, yang pada tahap awal mendampingi 243 anak, meskipun keberlanjutannya belum terdata. Di lapangan, pengurus lingkungan dan relawan pendidikan menjadi pihak yang paling dekat dengan anak-anak tersebut.

Penyediaan 42 ribu kursi SMP menunjukkan bahwa persoalan daya tampung pada jenjang SMP relatif dapat dikendalikan Pemkot. Kondisi ini mengalihkan perhatian pada titik rawan lain, yaitu perpindahan antarjenjang. Anak yang lulus SD memang tertampung di SMP, tetapi tidak ada jaminan mereka melanjutkan ke SMA atau SMK, terutama bagi keluarga dengan biaya terbatas. Perpres sendiri memasukkan anak yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya ke dalam kategori ATS, sehingga arah bantuan Pemkot kepada siswa SMA, SMK, dan MA sejalan dengan kebutuhan tersebut.

Selain bantuan langsung, Pemkot Surabaya menekan beban biaya pendidikan melalui larangan bagi sekolah negeri untuk menjual seragam. Seragam sering menjadi pengeluaran awal yang cukup berat bagi keluarga berpenghasilan rendah ketika anak memasuki jenjang baru, sehingga larangan tersebut menutup salah satu celah yang dapat membuat anak urung melanjutkan sekolah. Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan larangan pungutan dalam bentuk apa pun mulai November 2026. Bantuan Bopda berfungsi meringankan beban keluarga, sedangkan larangan tersebut memastikan sekolah tidak menambah beban baru, sehingga kedua kebijakan saling melengkapi.

Penentuan penerima bantuan berdasarkan desil kesejahteraan keluarga, yaitu desil 1 sampai 5, menunjukkan bahwa Pemkot memakai data kesejahteraan sebagai dasar sasaran. Pendekatan ini lebih terarah dibandingkan bantuan yang dibagikan secara merata, tetapi ketepatannya bergantung pada pemutakhiran data. Keluarga yang kondisinya memburuk setelah data ditetapkan dapat terlewat, sedangkan keluarga yang kondisinya membaik dapat tetap menerima bantuan. Karena itu, mekanisme pembaruan data serta kanal pengaduan warga menjadi bagian penting dari ketepatan sasaran. Dari sisi tata kelola, bantuan Bopda yang kini disalurkan melalui sekolah menunjukkan bahwa Pemkot belajar dari evaluasi pelaksanaan sebelumnya. Perubahan mekanisme tersebut menggeser sebagian tanggung jawab pengawasan kepada sekolah, sehingga kepala sekolah dan guru tidak hanya

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14659
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

berperan sebagai penyelenggara pembelajaran, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan bantuan sampai kepada siswa yang berhak. Peran ganda ini menambah beban kerja sekolah, sehingga dukungan administrasi dan pendampingan bagi sekolah perlu dipertimbangkan agar pengawasan tidak berubah menjadi formalitas.

Upaya pencegahan juga menyentuh lingkungan keluarga. Dispendik mendukung gerakan ayah mengantar anak ke sekolah sebagai bagian dari upaya mencegah fatherless, yakni kondisi ketika anak tumbuh tanpa keterlibatan figur ayah dalam pengasuhan. Gerakan ini memang tidak dirancang khusus untuk ATS, tetapi kehadiran orang tua di sekolah membuka kesempatan bagi guru untuk mengenal kondisi keluarga siswa. Informasi semacam ini berguna bagi sekolah dalam mengenali anak yang mulai menunjukkan tanda-tanda berisiko putus sekolah.

Dalam penjangkauan, Dispendik tidak bekerja sendiri. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada 2021 menyampaikan bahwa Pemkot terus mencari keberadaan anak putus sekolah dengan menggandeng IPSM, TKSK, lurah, serta pengurus RT/RW. Perhatian tersebut tidak dibatasi pada jenjang tertentu, karena anak putus sekolah pada jenjang SMA dan SMK pun tetap dicari. Pelibatan perangkat lingkungan menunjukkan bahwa penemuan anak putus sekolah bertumpu pada kedekatan sosial warga dengan anak-anak di sekitarnya. Kekuatan pendekatan ini terletak pada kemampuannya menjangkau anak yang tidak tercatat di sekolah mana pun, tetapi ketepatannya sangat bergantung pada kepekaan serta kesediaan masing-masing petugas melaporkan temuan.

Perpres 3/2026 membagi peran pelaksana dari tingkat pusat hingga desa atau kelurahan serta membuka ruang partisipasi masyarakat. Pembagian peran ini memberi dasar bagi Pemkot untuk melibatkan kelurahan secara lebih formal dalam pendataan dan penjangkauan, yang selama ini lebih banyak bertumpu pada kerja sama yang bersifat kebiasaan. Dengan dasar tersebut, kelurahan berpotensi menjadi simpul pertama yang mencatat anak berisiko putus sekolah sebelum informasinya diteruskan kepada dinas terkait. Namun, kewenangan yang lebih jelas hanya akan bermanfaat apabila disertai pelatihan bagi petugas kelurahan serta format pencatatan yang seragam.

Bagi anak yang sudah berada di luar sekolah, Sekolah Rakyat menjadi tambahan layanan yang penting. Menteri Sosial menyatakan bahwa Sekolah Rakyat memprioritaskan anak putus sekolah. Di Surabaya, kuota yang tersedia berjumlah 270 siswa, yaitu 90 anak untuk setiap jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan seleksi melalui penjangkauan langsung. Apabila dibandingkan dengan pemberitaan yang menyebut lebih dari 12.000 anak di Surabaya tidak melanjutkan pendidikan, kuota tersebut kurang dari 3 persen.

Angka ini tidak dimaksudkan untuk menilai program secara negatif, melainkan menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat perlu dipandang sebagai salah satu jalur pemulihan di antara beberapa jalur lainnya, bukan satu-satunya jawaban. Pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen juga menggerakkan relawan pendidikan untuk membantu ATS kembali belajar. Gerakan ini memberi ruang bagi warga untuk berperan secara langsung, tetapi keterhubungannya dengan kerja Dispendik dan perangkat lingkungan di Surabaya belum tergambar dalam sumber yang dikaji. Apabila relawan bekerja terpisah dari data dan alur layanan kota, upaya mereka berisiko tumpang tindih atau justru tidak menjangkau anak yang paling membutuhkan

Apabila dipetakan menurut unsur Pentahelix, peran pemerintah terlihat paling dominan, melalui Dispendik, Pemkot, serta Kemensos. Unsur masyarakat hadir melalui RT/RW, IPSM, dan TKSK, sedangkan relawan pendidikan digerakkan oleh Kemendikdasmen. Unsur akademisi hadir melalui program Campus Social Responsibility, tetapi keberlanjutannya belum terdata. Peran dunia usaha belum tergambar sebagai program yang khusus ditujukan bagi ATS di Surabaya, dan peran media sebatas penyebaran informasi. Dengan kata lain, struktur kolaborasi baru terisi sebagian, dan sebagian besar beban masih ditanggung pemerintah.

Persoalan data tetap menjadi benang merah. Data Kemendikdasmen per 1 April 2026 mencatat lebih dari 3,9 juta ATS secara nasional, sementara Kemendikdasmen sendiri mengakui bahwa validitas data merupakan tantangan terbesar di daerah. Di Surabaya, perbedaan angka antara pernyataan resmi dan pemberitaan memperlihatkan bahwa jumlah ATS yang sesungguhnya belum dapat dipastikan. Selama basis data belum seragam, perencanaan program, penentuan kuota, hingga penyaluran bantuan berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa kebijakan Surabaya bergerak pada tiga sisi. Sisi pertama adalah penurunan biaya, melalui larangan menjual seragam, larangan pungutan, serta bantuan Bopda. Sisi kedua adalah penyediaan layanan, melalui kursi SMP, SKB, dan Sekolah Rakyat. Sisi ketiga adalah penjangkauan anak, melalui RT/RW, IPSM, dan TKSK. Ketiga sisi tersebut sudah berjalan, tetapi penghubungnya, yaitu data terpadu serta alur rujukan, belum tergambar dalam sumber yang dikaji.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14659
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Pembahasan

Upaya Surabaya dalam mencegah dan menangani ATS sudah cukup kuat pada dua lapisan ekosistem. Di makrosistem, Perpres 3/2026 menjadi payung hukum yang diperkuat kebijakan kota berupa penyediaan kursi sekolah dan penghapusan pungutan. Di mikrosistem, keluarga dan sekolah mulai ditopang melalui bantuan biaya pendidikan yang kini disalurkan lewat sekolah agar tepat sasaran.

Meski demikian, hubungan antarlembaga di mesosistem masih lemah. Dispendik, Dinas Sosial, sekolah, dan perangkat lingkungan sudah bekerja, tetapi belum memiliki data bersama yang menjadi pegangan. Ketiadaan data terpadu juga memengaruhi eksosistem, sebab kebijakan dan anggaran daerah belum bisa disusun berdasarkan jumlah anak yang sebenarnya. Akibatnya, Bopda, SKB, program kampus, dan Sekolah Rakyat berjalan sendiri-sendiri dan belum membentuk satu sistem yang saling melengkapi.Kondisi serupa tampak dalam kolaborasi Pentahelix. Pemerintah, akademisi, dan masyarakat telah bergerak, sedangkan dunia usaha dan media belum dilibatkan secara sistematis. Padahal, Perpres 3/2026 sudah membuka dasar hukum bagi keterlibatan keduanya, sehingga peluangnya tersedia dan tinggal dimanfaatkan. Keberlanjutan program pun masih bergantung pada anggaran daerah serta kemampuan menjaga mutu layanan seiring bertambahnya penerima bantuan.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan ekosistem pendidikan di Surabaya perlu bertumpu pada tiga langkah. Pertama, menyusun data ATS dan ABPS yang terpadu sebagai dasar kerja semua pihak. Kedua, membentuk forum koordinasi lintas pihak yang bersifat tetap agar program tidak berjalan terpisah. Ketiga, menetapkan peran yang jelas bagi dunia usaha dan media, sehingga seluruh unsur Pentahelix dapat berfungsi bersama.

Pada lapisan makrosistem, Perpres 3/2026 menyediakan arah dan kewenangan, tetapi efektivitasnya baru terlihat ketika diterjemahkan menjadi program kota yang konkret. Target nol ATS pada 2045 bersifat jangka panjang, sehingga Pemkot memerlukan tahapan serta indikator antara yang dapat diukur setiap tahun. Kebijakan Surabaya sejauh ini lebih banyak berfokus pada daya tampung sekolah dan beban biaya. Kedua aspek tersebut penting, tetapi belum menyentuh anak yang telah lama berada di luar sekolah, yang membutuhkan pendekatan berbeda berupa penjangkauan, pendampingan, serta pilihan jalur belajar yang sesuai dengan kondisi mereka.

Sebagai kota besar dengan kapasitas fiskal dan jaringan perangkat yang relatif kuat, Surabaya berada pada posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan banyak daerah lain. Justru karena kondisi tersebut, persoalan data dan koordinasi yang masih ditemukan patut mendapat perhatian, sebab kendala yang muncul bukan terutama soal ketersediaan layanan, melainkan keterpaduannya. Temuan ini menunjukkan bahwa penambahan program baru belum tentu menjawab persoalan apabila program yang sudah ada belum saling terhubung.

Pada lapisan mikrosistem, biaya bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberlangsungan sekolah. Berbagai kajian menunjukkan bahwa motivasi belajar anak, perhatian keluarga, serta lingkungan pergaulan turut berpengaruh. Penyaluran bantuan melalui sekolah memperkuat posisi sekolah sebagai pintu pertama untuk mengenali anak berisiko putus sekolah. Namun, dalam sumber yang dikaji belum ditemukan gambaran mengenai sistem peringatan dini di tingkat sekolah, misalnya pemantauan kehadiran, perubahan prestasi, atau perubahan kondisi ekonomi keluarga. Padahal sistem semacam ini memungkinkan sekolah bertindak sebelum anak benar-benar berhenti bersekolah.

Keluarga perlu ditempatkan sebagai mitra, bukan hanya sebagai penerima bantuan. Bantuan biaya memang meringankan, tetapi keberlangsungan sekolah anak juga ditentukan oleh perhatian orang tua terhadap pendidikan serta kemampuan keluarga menghadapi persoalan sehari-hari. Karena itu, sekolah dan perangkat lingkungan dapat mengembangkan komunikasi yang rutin dengan orang tua, misalnya melalui pertemuan berkala atau kunjungan ke rumah bagi siswa yang sering tidak hadir. Pendekatan ini memperkuat hubungan antara keluarga dan sekolah di mesosistem sekaligus menyiapkan dukungan lebih awal sebelum anak memutuskan berhenti bersekolah.

Interaksi antarlapisan terlihat dari contoh berikut. Larangan pungutan di tingkat kota tidak akan berdampak apabila keluarga tidak mengetahuinya atau sekolah tetap mencari celah pembiayaan. Karena itu, sosialisasi kebijakan kepada orang tua serta kanal pengaduan yang mudah diakses menjadi penghubung antara kebijakan kota dan pengalaman keluarga sehari-hari. Hubungan timbal balik semacam ini merupakan inti pendekatan ekologis Bronfenbrenner, yakni bahwa perubahan pada satu lapisan baru bermakna ketika lapisan lain ikut bergerak.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14659
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dari sisi teori, temuan ini memperlihatkan bahwa pendekatan ekologis Bronfenbrenner dan kerangka Pentahelix saling melengkapi. Bronfenbrenner membantu menjelaskan di lapisan mana persoalan ATS bermula dan bagaimana lapisan tersebut saling memengaruhi, sedangkan Pentahelix membantu menjelaskan siapa saja yang semestinya bergerak pada setiap lapisan. Kekuatan Surabaya terlihat pada lapisan yang dekat dengan anak, sedangkan kelemahannya terletak pada penghubung antarlapisan serta keterlibatan pihak di luar pemerintah. Dengan demikian, penguatan ekosistem pendidikan tidak cukup dengan menambah program, tetapi menuntut penataan hubungan antaraktor.

Pada lapisan mesosistem, penghubung antara keluarga, sekolah, pengurus lingkungan, serta dinas terkait menentukan apakah anak yang telah ditemukan benar-benar terlayani. Temuan di lapangan oleh RT/RW atau TKSK baru bermakna apabila diikuti alur rujukan yang jelas, mulai dari pencatatan, penentuan layanan yang sesuai, pendampingan, hingga pemantauan setelah anak kembali belajar. Dalam sumber yang dikaji, alur baku semacam ini belum tergambar. Tanpa alur tersebut, anak berisiko ditemukan tetapi tidak tertangani, atau justru ditangani beberapa pihak sekaligus tanpa koordinasi.

Jalur pendidikan nonformal perlu mendapat porsi yang sepadan. Bagi anak yang usianya telah melampaui batas masuk sekolah reguler atau yang sudah lama berhenti belajar, PKBM dan SKB menawarkan pendidikan kesetaraan dengan waktu belajar yang lebih lentur. Jalur ini sejalan dengan Perpres yang menempatkan pendidikan formal maupun nonformal sebagai tujuan pengembalian anak, sehingga kembalinya anak ke salah satu jalur tersebut sudah dihitung sebagai keberhasilan. Tantangannya terletak pada kemampuan menjaga anak tetap hadir, sebab anak yang kembali dengan beban bekerja atau mengasuh adik membutuhkan pendampingan yang berbeda dari siswa reguler.

Pada lapisan eksosistem dan dalam kerangka Pentahelix, ruang pengembangan masih terbuka luas. Dunia usaha dapat berperan melalui beasiswa, pelatihan keterampilan bagi anak yang menempuh jalur nonformal, serta kesempatan magang bagi remaja yang hampir menamatkan sekolah. Media dapat berfungsi bukan hanya sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai pengawas yang menjaga perhatian publik terhadap capaian program. Akademisi dapat membantu melalui kajian, pemetaan wilayah rawan, serta pendampingan belajar. Perpres 3/2026 telah membuka dasar hukum bagi keterlibatan semua unsur tersebut, sehingga yang dibutuhkan adalah wadah yang mempertemukan mereka dengan kebutuhan lapangan yang terukur.

Penguatan koordinasi dapat diwujudkan melalui forum tetap tingkat kota, misalnya berbentuk gugus tugas yang melibatkan Dispendik, dinas sosial, kecamatan, kelurahan, sekolah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta perwakilan media. Forum tersebut berfungsi menyepakati data rujukan, membagi peran, dan mengevaluasi capaian secara berkala. Tanpa forum semacam ini, kolaborasi cenderung bergantung pada hubungan pribadi antarpetugas atau pada momentum tertentu, sehingga mudah melemah ketika terjadi pergantian pejabat atau berakhirnya program.

Pengukuran capaian perlu dirancang sejak awal agar upaya penguatan ekosistem dapat dievaluasi. Indikator yang dapat digunakan antara lain jumlah anak berisiko putus sekolah yang teridentifikasi, jumlah ATS yang berhasil kembali ke pendidikan formal maupun nonformal, serta jumlah anak yang tetap bertahan setelah satu tahun kembali belajar. Indikator semacam ini memungkinkan Pemkot membedakan antara program yang sekadar menjangkau anak dan program yang benar-benar menjaga keberlangsungan pendidikan mereka. Hasil pengukuran juga dapat menjadi bahan bagi unsur Pentahelix lain untuk menentukan bentuk dukungan yang paling dibutuhkan.

Aspek keberlanjutan perlu mendapat perhatian khusus. Program yang bergantung pada anggaran daerah akan menghadapi tekanan ketika jumlah penerima meningkat, sehingga kualitas layanan harus dijaga bersamaan dengan perluasan jangkauan. Keberhasilan juga sebaiknya tidak hanya diukur dari jumlah anak yang kembali ke sekolah, tetapi dari jumlah anak yang bertahan hingga menamatkan jenjang pendidikannya. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bertumpu pada data sekunder, sehingga gambaran pelaksanaan di lapangan masih perlu dikonfirmasi melalui wawancara dengan pihak terkait pada penelitian lanjutan.

Di samping tiga langkah utama tersebut, terdapat langkah pendukung yang dapat memperkuat hasilnya. Sekolah perlu memiliki sistem peringatan dini untuk mengenali anak berisiko putus sekolah. Pemkot perlu menetapkan alur rujukan yang baku agar setiap anak yang ditemukan memperoleh layanan yang sesuai. Setelah anak kembali belajar, pemantauan berkala diperlukan untuk memastikan anak bertahan, bukan sekadar terdaftar. Ketiga langkah pendukung ini melengkapi penguatan data, koordinasi, dan pelibatan dunia usaha serta media, sehingga ekosistem pendidikan di Surabaya dapat bekerja sebagai satu kesatuan.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14659
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

4. Kesimpulan

Penguatan ekosistem pendidikan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menangani permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Surabaya. Sebab, anak yang tidak melanjutkan pendidikan bukan hanya disebabkan oleh kurangnya akses terhadap sekolah. Ada faktor lain yang turut memengaruhi, seperti kondisi ekonomi keluarga dan lingkungan sosial. Artinya, persoalan ATS tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah atau lembaga pendidikan, tetapi perlu dilihat sebagai tanggung jawab bersama. Melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026, pemerintah telah memiliki landasan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan ATS dengan melibatkan berbagai sektor. Di Kota Surabaya sendiri, sejumlah upaya telah dilakukan, mulai dari penyediaan daya tampung sekolah hingga pemberian bantuan pendidikan melalui program Bopda. Meskipun demikian, keberadaan program tersebut belum cukup apabila pelaksanaannya masih berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan koordinasi yang lebih kuat agar bantuan dan layanan pendidikan benar-benar dapat menjangkau anak-anak yang membutuhkan. Oleh karena itu, penguatan ekosistem pendidikan perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak sebagaimana dijelaskan dalam konsep Pentahelix, yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Jika dikaitkan dengan teori ekologi Bronfenbrenner, dukungan terhadap pendidikan anak juga harus dibangun dari lingkungan terdekat hingga lingkungan yang lebih luas. Dengan begitu, pencegahan dan penanganan ATS tidak hanya berfokus pada mengembalikan anak ke sekolah, tetapi juga memastikan mereka dapat bertahan dan melanjutkan pendidikan. Pada akhirnya, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada kerja sama yang berkelanjutan, pendataan yang tepat, serta kebijakan yang mampu menjawab kondisi nyata di masyarakat. Dengan langkah tersebut, pemenuhan hak pendidikan bagi setiap anak di Kota Surabaya dapat diwujudkan secara lebih merata.

Reference

1. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah.
2. https://jdih.surabaya.go.id/others/4804
3. UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1)
4. Kemendikdasmen (2026), data ATS per 1 April 2026 https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2026/ada-39-juta-anak-tidak-sekolah-kurniasih-waka-komisi-x-dpr-dorong-kolaborasi-perluas-akses-pendidikan/
5. BPS (2026), Susenas https://rri.co.id/kupang/info-kementerian/2468350/perpres-ats-diluncurkan-378-juta-anak-jadi-fokus
6. JPPI (2026) https://jogja.antaranews.com/berita/833235/mpr-mendorong-kolaborasi-dan-upaya-nyata-cegah-anak-putus-sekolah
7. ANTARA. (2026, 15 Juli). Kemiskinan diputus lewat sekolah.
8. https://megapolitan.antaranews.com/berita/540275/kemiskinan-diputus-lewat-sekolah
9. JawaPos. (2026, 20 Mei). Cegah anak putus sekolah, Pemkot Surabaya siapkan 42 ribu kursi SMP di SPMB 2026.
10. https://www.jawapos.com/surabaya-raya/2605200295/cegah-anak-putus-sekolah-pemkot-surabaya-siapkan-42-ribu-kursi-smp-di-spmb-2026
11. Koloway, B. C. (2025). 12 ribu anak putus sekolah di Surabaya, Pemkot giatkan pendataan dan maksimalkan wajib belajar. Surya.co.id.
12. https://surabaya.tribunnews.com/surabaya-metro/1911118/12-ribu-anak-putus-sekolah-di-surabaya-pemkot-giatkan-pendataan-dan-maksimalkan-wajib-belajar
13. Mardiyanto, & Prabandani, H. W. (2026, 19 Juni). Perpres 3/2026: Strategi implementasi dan masa depan pendidikan anak Indonesia. Hukumonline.
14. https://www.hukumonline.com/berita/a/perpres-3-2026--strategi-implementasi-dan-masa-depan-pendidikan-anak-indonesia-lt6a34fc54a92f8/
15. JawaPos. (2026, 28 Juni). Gedung Sekolah Rakyat di Surabaya hampir rampung, Mensos target beroperasi Juli 2026.
16. https://www.jawapos.com/surabaya-raya/2606280167/gedung-sekolah-rakyat-di-surabaya-hampir-rampung-mensos-target-beroperasi-juli-2026
17. Republika. (2026, 20 Oktober). Wali Kota Surabaya larang sekolah lakukan pungutan ke siswa
18. https://rejogja.republika.co.id/berita/tn770f282/wali-kota-surabaya-larang-sekolah-lakukan-pungutan-ke-siswa
19. ANTARA. (2026, 24 September). Wali Kota Surabaya larang sekolah negeri jual seragam
20. https://www.antaranews.com/berita/5756563/wali-kota-surabaya-larang-sekolah-negeri-jual-seragam
21. ANTARA Jatim. (2026). Mensos: Sekolah Rakyat prioritaskan anak putus sekolah.
22. https://jatim.antaranews.com/berita/1062768/mensos-sekolah-rakyat-prioritaskan-anak-putus-sekolah
23. JawaPos. (2026, 13 Juli). Dispendik Surabaya: Gerakan ayah antar anak ke sekolah jadi upaya cegah fatherless
24. https://www.jawapos.com/surabaya-raya/2607130358/dispendik-surabaya-gerakan-ayah-antar-anak-ke-sekolah-jadi-upaya-cegah-fatherless
25. Suara Surabaya. (2021). Pemkot terus mencari anak putus sekolah
26. https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/pemkot-terus-mencari-anak-putus-sekolah/
27. Sanjaya, S., Priyatno, A. M., Yanto, F., & Afrianty, I. (2018). Klasifikasi Diabetik Retinopati Menggunakan Wavelet Haar dan Backpropagation Neural Network. *Seminar Nasional Teknologi Informasi Komunikasi Dan Industri (SNTIKI-10)*, 77–84.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14659
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)